

BAB IV

RELEVANSI FILSAFAT BAHASA LUDWIG WITTGENSTEIN DAN KRITIK TERHADAPNYA

Tinjauan Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein dalam bab sebelumnya di atas menjadi basis konseptual untuk mencari relevansi konkret terhadap kehidupan. Pertanyaan yang perlu dijawab di sini ialah apa hubungan Filsafat Bahasa Wittgenstein dengan dimensi epistemologis kehidupan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, berikut dimensi aksiologis yaitu bagaimana pandangan tentang bahasa itu memengaruhi sikap dan tindakan dalam bingkai kehidupan yang plural serta bagaimana bahasa membentuk realitas serentak menghantar orang kepada pemahaman yang benar dan tindakan yang baik? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk menegaskan bahwa bahasa selalu merupakan entitas yang tidak pernah terpisah dari persoalan kehidupan. Bahasa dibentuk dan membentuk kehidupan.

Berangkat dari pertanyaan di atas, bab ini akan berisikan uraian tentang relevansi Filsafat Bahasa Wittgenstein dengan kehidupan manusia. Penulis sengaja menguraikan relevansi itu masing-masing berdasarkan dua maha karya Wittgenstein karena keduanya memberi tilikan yang sangat berbeda tentang bahasa. Relevansi ini berbasis antara lain dari pengaruh pemikiran Wittgenstein terhadap berbagai aliran filsafat dan epistemologi pada umumnya.

Selain berisikan Relevansi Filsafat Bahasa Wittgenstein, dalam bab ini penulis juga akan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pemikiran Wittgenstein. Upaya ini dilakukan untuk membangun keberlanjutan diskursus intelektual tentang filsafat bahasa secara umum. Catatan kritis ini dapat dikatakan sebagai manifestasi dari fungsi mendasar Filsafat yakni tidak saja mengisi “bejana” dengan apa yang dinamakan pengetahuan tetapi yang terpenting menghidupkan api kritisisme. Atau sebagaimana yang ditegaskan Wittgenstein; filsafat adalah aktivitas dan bukan kumpulan doktrin. Bab ini akan berturut turut menguraikan relevansi pemikiran Wittgenstein dan kemudian kritik terhadapnya.

4.1 Relevansi Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein

4.1.1 Dalam *Tractatus Logico-Philosophicus*

4.1.1.1 Terhadap Neopositivisme

Istilah Neopositivisme sama artinya dengan Positivisme Logis.¹²³ Istilah Neopositivisme tidak dapat terpisahkan dari konsep dasar aliran Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte (1789-1857), seorang peletak dasar Positivisme.¹²⁴

Kata “Positif” dalam konteks ini dapat disamakan artinya dengan “faktual” atau “berdasarkan fakta”. Kalau seseorang dinyatakan Positif Covid-19 maka secara faktual ditemukan adanya virus Covid di dalam tubuhnya atau jika seseorang dinyatakan Positif HIV maka itu berarti ditemukan virus HIV di dalam dirinya. Fakta yang ditemukan di sini ditempuh dengan observasi yang teliti dan observasi selalu bersifat empiris yakni melibatkan indra (penglihatan, pendengaran, peraba, dll).

Neopositivisme dapat disebut sebagai Gerakan Baru dalam filsafat yang berupaya mencapai status ilmiah yang legitim yakni membebaskan ilmu pengetahuan dari keyakinan-keyakinan tak berdasar. Kendati menolak metafisika dan etika sebagai bidang ilmu yang tidak didasarkan pada fakta, Neopositivisme berpengaruh dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan saintifik yang berkontribusi bagi peradaban dunia seperti ilmu kedokteran, analisa sosial atas fakta

¹²³ Dari segi terminologi, kata Positivisme sebenarnya memiliki kesamaan makna dengan istilah Empirisme. Namun, istilah Empirisme lazim disematkan pada aliran filsafat yang berkembang di Amerika, Inggris dan Skandinavia. Sedangkan Positivisme lazim digunakan dalam aliran filsafat di Prancis, Austria dan Jerman. Lih. Prof. Dr. Kaelan, MS, *Filsafat Bahasa, Realitas Bahasa, Logika Bahasa, Hermeneutika dan Postmodernisme*, op. cit., hlm. 121.

¹²⁴ Auguste Comte dalam bukunya *The Positive Philosophy* mengemukakan tiga tahap perkembangan intelektual manusia yakni tahap teologis, metafisis dan positif. Pada tahap teologis, manusia menafsirkan gejala-gejala yang berada di sekelilingnya dan menghubungkannya dengan sumber atau pengasal gejala tersebut yakni para dewa/i. Manusia belum bisa mengetahui mengapa suatu gejala sosial terjadi. Misalnya, pelangi dipahami sebagai jalan dewa/i menuju ke tempat permandian atau gempa bumi ditafsir sebagai cara dewa/dewi memastikan apakah manusia masih ada di bumi atau tidak. Selanjutnya dalam tahap metafisis, manusia berupaya menjelaskan suatu gejala sosial dengan tidak lagi didasarkan pada dewa/i sebagai pengasal tetapi pada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam benda-benda tertentu kendati manusia belum bisa menjelaskan kekuatan abstrak tersebut. Sedangkan pada tahap positif, manusia mampu menemukan hukum-hukum yang menyebabkan suatu gejala sosial atau gejala alam terjadi. Misalnya, gempa bumi sudah dipahami sebabnya yakni adanya pergeseran lempeng bumi atau adanya letusan gunung. Lih. Bernard Raho SVD, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 20-22.

dan gerakan sosial serta perkembangan teknologi yakni penemuan-penemuan teknis untuk meringankan (bahkan menggantikan) pekerjaan manusia.

Secara historis, implikasi pemikiran Wittgenstein terhadap neopositivisme sangat signifikan. Moritz Schlick (1882-1936) fisikawan yang adalah perintis gerakan neopositivisme mendapat inspirasi dari pemikiran Wittgenstein I tentang *Theory Picture*. Moritz adalah seorang anggota Lingkaran Wina, sebuah kelompok intelektual yang berpusat di Wina. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam bab II, pengaruh Wittgenstein tidak secara langsung karena Wittgenstein tidak aktif terlibat dalam kelompok Lingkaran Wina tetapi pemikirannya sangat memengaruhi manifesto para ilmuwan Lingkaran Wina yang tertuang dalam suatu deklarasi ilmiah pada kongres internasional bertajuk “Pandangan Dunia yang Bersifat Ilmiah: Lingkungan Wina”. Deklarasi itu ditulis oleh Neurath, Hans Hahn dan Rudolf Carnap dan berisikan posisi intelektual kelompok lingkaran Wina tentang pendirian pada ilmu pengetahuan positivistik.¹²⁵ Kiblat pemikiran ini tak lain merupakan implikasi langsung dari gagasan Wittgenstein I.

Secara ringkas, pandangan Wittgenstein pada waktu itu memiliki dua implikasi penting terhadap para ilmuwan Lingkaran Wina.¹²⁶ Pertama, lahirnya gagasan atau konsep bahwa ilmu pengetahuan yang valid pada prinsipnya mesti berpusat pada data. Sebagai dampak dari pemikiran Wittgenstein, pandangan ini digagas oleh Moritz Schlick. Moritz memberi contoh dalam konteks ilmu Fisika. Menurutnya, Fisika tidak lagi berbicara tentang alam kosmologi yaitu tentang prinsip-prinsip terakhir dan hakikat realitas dari perubahan alam semesta sebagaimana pencarian para filsuf klasik Yunani tetapi Fisika pada prinsipnya berurusan dengan pencarian unsur-unsur sebuah badan fisik.¹²⁷ Dalam ilmu Psikologi misalnya, manusia tidak lagi ditilik dari segi kodratnya sebagaimana yang dikembangkan Plato (distingsi jiwa-badan), tetapi pada unsur-unsur dalam diri sang aku. Persis di sini, data-data empiris menjadi basis legitim dalam upaya mencari kevalidan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hemat penulis, pandangan

¹²⁵ Prof. Dr. Kaelan, MS, *op. cit.*, hlm. 121.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 30.

Wittgenstein turut membentuk spesifikasi epistemologis dalam pembentukan disiplin ilmu. Atau dengan kata lain, gagasan Wittgenstein dalam *Tractatus*, turut membentuk paradigma baru dalam klasifikasi epistemis ilmu.

Kedua, munculnya orientasi filsafat yang cukup berbeda dari Schlick di atas yakni perhatian terhadap makna logis dari proposisi-proposisi ilmiah yang disebut kepastian proposisi ilmiah. Orientasi filsafat ini dipelopori oleh Filsuf Lingkaran Wina lainnya seperti Rudolf Carnap, Otto Neurath dan Friedrich Waismann untuk menyebut beberapa nama.¹²⁸ Paradigma ini berkaitan dengan fungsi filsafat yaitu untuk memastikan apakah sebuah pernyataan merupakan pernyataan yang jelas dan tidak ambigu ataukah sebaliknya. Basis paradigma ini tetap pada pendapat positivisme yakni bahwa ilmu pengetahuan mesti didasarkan pada data dan pengalaman. Namun, menurut mereka ilmu pengetahuan yang hanya didasarkan pada data saja tidak cukup dan belum memenuhi syarat kevalidan sebagai sebuah sistem ilmu. Ilmu Pengetahuan juga merupakan sebuah sistem data yang tersusun secara logis. Di sinilah letak konsentrasi para penganut aliran Positivisme Logis. Disebut logis karena berhubungan dengan makna logis sebuah pernyataan dan struktur logis dalam sistem ilmu.¹²⁹

Implikasi pandangan Wittgenstein yang disebutkan terakhir di atas menarik garis demarkasi antara Positivisme Klasik dan Positivisme Logis yang dimulai kemudian. Persis, bagian ini menjawab pertanyaan apakah yang membedakan Positivisme Klasik dan Positivisme Logis yang diinspirasi Wittgenstein. Perbedaannya dijelaskan demikian. Paradigma Positivisme Klasik hanya semata-mata berpusat pada data dan pengalaman. Sejauh sebuah pernyataan dapat dibuktikan melalui observasi maka pernyataan itu bersifat ilmiah. Sedangkan Positivisme Logis memperhatikan data empiris dengan menganalisa terlebih dahulu variabel-variabel yang dipakai dalam sebuah pernyataan sekaligus kesatuan logis data empiris yang telah dikumpulkan.¹³⁰ Dengan demikian, Positivisme Logis/Neopositivisme menganggap bahwa Ilmu Pengetahuan memiliki dua unsur

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹³⁰ *Ibid.*

pembentuk sekaligus yakni data empiris dan kesatuan logis struktur data empiris yang membentuk satu sistem ilmu yang koheren dan sistematis.

Filsafat Bahasa Wittgenstein relevan dewasa ini dalam konteks perkembangan ilmu-ilmu empiris. Disiplin ilmu-ilmu empiris diperketat dengan observasi dan eksperimen yang teliti dan komprehensif sambil terus membangun keterjalinan dengan ilmu-ilmu humaniora untuk merefleksikan kesinambungannya dengan perkembangan manusia secara kompleks. Pandangan Wittgenstein sebenarnya memberi inspirasi bagi pengembangan profesionalitas ilmu-ilmu sains. Sains berkembang dalam rumusan bahasa hipotetik yang terus diverifikasi dan difalsifikasi terus menerus dalam satu keterjalinan dialektika kehidupan dan pengetahuan.¹³¹

Hemat penulis, “yang mistis” sebagai term untuk menyebut sesuatu yang berada di luar “dunia” menurut pandangan Wittgenstein dapat juga ditafsir sebagai konsep-konsep metafisis di mana Ilmu Pengetahuan yang positivistik juga tidak dapat meminggirkan humanitas/kemanusiaan, kebebasan, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep itu tinggal sebagai wilayah “mistis” yang kendati tidak dapat diverifikasi secara empiris tetapi menjadi wilayah yang tidak bisa dilanggar dan dirampas.

4.1.1.2 Tindakan Berbahasa dalam Konteks Fungsi Deskriptif dan Konstitutif Bahasa

Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein kendati merupakan pencarian filosofis konseptual untuk menemukan hakikat bahasa, juga sebenarnya berdampak pada tindakan berbahasa yang paling konkret. Pandangan Wittgenstein di sini dapat dilihat sebagai “jembatan” untuk mejernihkan pemahaman kita tentang bahasa serentak melihat sejauh mana kita menghadirkan realitas tertentu melalui bahasa tersebut. Pandangan Wittgenstein, hemat penulis sangat relevan dalam konteks pembentukan makna baru seturut dua fungsi bahasa yakni Fungsi Deskriptif, dan Konstitutif Bahasa.¹³²

¹³¹ Drs. Hamdani, M.A, *Filsafat Sains* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

¹³² Ada berbagai fungsi bahasa bagi kehidupan. Penulis memilih dua fungsi ini dalam upaya mempertegas relevansi Filsafat Bahasa Wittgenstein. Sebagai pembanding, penulis merujuk pada

Pertama, Fungsi Deskriptif. Bahasa sebagai gambar realitas adalah inti pemikiran Wittgenstein awal. Tindakan berbahasa selalu berhubungan dengan daya abstraksi seseorang untuk menangkap pengalaman dan mengabstraksikannya. Bahasa memberi petunjuk kepada kita untuk memahami sesuatu. Wittgenstein sejak awal sudah memberi awasan tentang kebermaknaan sebuah bahasa yang berbasis pada *state of affairs* (keberadaan peristiwa). Distingsi antara sebuah pernyataan yang berarti (*meaningfull*) dan nirarti (*meaningless*) mempertegas bahwa ada disiplin berbahasa (selain secara gramatis) untuk mengungkap sesuatu. Persis di sini, hemat penulis, fungsi bahasa untuk mengungkap “dunia” dalam apa yang disebut Wittgenstein sebagai proposisi menjadi basis tindakan berbahasa manusia. Berbahasa sendiri adalah tindakan menyingkap sesuatu dan menjadikan sesuatu menjadi terlihat, terdengar, terejawantah. Kita semua tahu benda konkret yang dirujuk oleh kata “air” atau kita paham bahwa benda konkret yang disebut sebagai “kayu” itu berbeda dengan benda yang ditunjuk oleh kata “api”. Bahasa medeskripsikan sesuatu agar dapat diterima oleh pemikiran kita, membuat sesuatu menjadi benderang dan kita dapat membuat distingsi satu hal dengan hal yang lain.

Namun, nasib bahasa sebagai penunjuk dan pengungkap realitas ini pada akhirnya ditentukan oleh subjek yang memakai bahasa. Subjek yang berbahasa pun memakai bahasa sebagai pengungkap realitas. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa dua elemen penting dalam tindakan berbahasa manusia yakni berkata dan berbicara/bersuara tidaklah identik. Di sini, hemat penulis, relevansi pemikiran Bahasa Wittgenstein ini sejalan dengan apa yang digagas Heidegger tentang bahasa.¹³³ Menurut Heidegger, berbahasa adalah tindakan mengungkap realitas dan bukan sekedar menghamburkan kata-kata tanpa arti. Kiranya gagasan Wittgenstein tentang bahasa sebagai gambar realitas dan pandangan Heidegger ini sejajar dalam memproposalkan sebuah tindakan berbahasa yang mengandung di dalamnya

artikel P. Silevester Ule, SVD berjudul “Fungsi dan Daya Bahasa” yang dimuat dalam halaman *Facebook* “Dunia Filsafat Ledalero”, <https://www.facebook.com/search/posts/?q=Fungsi%20dan%20Daya%20Bahasa>, diakses pada 12 Februari 2023.

¹³³ Sebagaimana dikutip Sugiharto, Heidegger menulis dalam *On The Way to Language*, “Berkata dan bicara tidaklah identik. Seseorang bisa saja bicara banyak tapi tidak mengatakan sesuatu pun. Orang lain mungkin tinggal diam saja, tetapi tanpa bicara ia justru mengatakan banyak hal...berkata berarti menyingkapkan, menjadikan terlihat dan terdengar”. Lih. Bambang Sugiharto, *op. cit.*, hlm. 89.

realitas. Konsekuensi logis ialah jika manusia berbahasa tanpa mendeskripsikan realitas maka ia menyangkal secara tegas posisinya sebagai *animal rationale* dan *animal symbolicum*, sebuah imperatif untuk berbahasa dengan referensi yang jelas dan simbol yang bermakna.¹³⁴

Kedua, Fungsi Konstitutif. Wittgenstein menjelaskan tentang bahasa yang didasarkan pada dunia. Hubungan bahasa dan dunia berbanding lurus. Hubungan itu didasarkan pada logika. Hemat penulis, Wittgenstein justru mengupayakan agar bahasa dapat menghadirkan realitas sehingga kita yang memakai bahasa dapat memahami sesuatu secara terus terang. Fungsi Konstitutif bahasa karena itu berhubungan dengan kegamblangan bahasa untuk menghadirkan makna dan dengan demikian makna tersebut menentukan cara kita bersikap dan berpersepsi terhadap dunia. Di sini, pandangan Wittgenstein tampaknya menghardik eufemisme di dalam bahasa yang notabene memperhalus pengertian bahasa tertentu. Cara berbahasa yang berbeda terhadap satu realitas atau objek yang sama akan berimplikasi pula pada reaksi kita yang berbeda pula. Eufemisme di sini dapat dicontohkan sebagai berikut.¹³⁵

Pada masa rezim Orde Baru, Presiden Soeharto mengampanyekan istilah “normalisasi kampus” di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di balik istilah “normalisasi kampus” sebenarnya tersimpan intensi destruktif bagi demokrasi yaitu pembungkaman terhadap kritisisme mahasiswa. Andaikata, eufemisme itu ditiadakan dan dipakai sebuah istilah yang lebih gamblang seperti “pembungkaman terhadap mahasiswa” tentu tanggapan publik waktu itu akan berbeda. Demikian pun rezim Hitler di Jerman yang menciptakan eufemisme seperti “kontrol populasi” padahal yang terjadi adalah “pembantaian rasial”. Orang Jerman bahkan tidak tahu soal eufemisme itu dan bahkan menanggapinya sebagai bentuk kontrol pemerintahan yang baik. Andaikata eufemisme itu diubah menjadi genosida (terhadap bangsa Yahudi) maka orang akan bereaksi lain. Demikian pun dalam tindakan korupsi di Indonesia sebagai sebuah tindakan pencurian, justru disembunyikan di balik eufemisme, “uang jalan”, “uang pelicin”, “upeti”, dll.

¹³⁴ Porat Antonius, *Bahasa Rumah Kita Bersama, Menghindari Language Disadvantage, Mencegah Kerusakan Otak Berbahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 77.

¹³⁵ P. Silvester Ule SVD, *loc. cit.*

Istilah itu akan berbeda maknanya jika disebut secara gamblang sebagai “pencurian”. Karena itu, seorang yang tertangkap korupsi akan berbeda jika disebut pencuri ketimbang koruptor. Bahasa yang digunakan turut membentuk persepsi orang tentang korupsi. Begitupun dengan praktik Aborsi, yang sebenarnya merupakan pembunuhan terhadap manusia, tetapi sekarang diartikan sebagai “mengakhiri kehamilan” (*terminating a pregnancy*). Perzinahan atau seks di luar nikah, yang secara tradisional dianggap sebagai dosa, sekarang di negara Barat sekular dinamakan saja sebagai “tidur dengan” (*going to bed with*). Andaikata, istilah itu digamblangkan menjadi pembunuhan dan perzinahan maka reaksi, persepsi dan bahkan tindakan responsif orang juga turut berubah.

Hemat penulis, yang penting bukan soal perubahan tersebut, melainkan kenyataan bahwa dengan mengubah bahasa, maka orang juga bisa mengubah persepsi dan sikap terhadap realitas. Kendati merujuk pada satu referensi yang sama tetapi dibahasakan secara berbeda maka persepsi pun berbeda. Di sini, bahasa tidak hanya menjadi instrumen penyampai informasi tetapi juga turut membentuk makna baru.

Sumbangan Wittgenstein tentang bahasa tentu sangat penting dalam upaya membangun kebajikan-kebajikan personal dan komunal yakni kejujuran untuk menyatakan sesuatu secara terus terang. Wittgenstein sejak awal berbicara tentang prinsip kesesuaian antara fakta dan proposisi dalam berbahasa. Hanya dengan kesesuaian ini, sebuah kenyataan bisa diungkapkan. Kesesuaian antara proposisi dan kenyataan yang diacunya membentuk kebenaran. Berbahasa pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk menyatakan kebenaran. Dengan demikian, tindakan berbahasa yang berbasis pada kesesuaian fakta dan proposisi mengandung di dalamnya sebuah kabajikan yang menjadi tujuan akhir berfilsafat yakni kebenaran.

4.1.1.3 Teori Kebenaran Koherensi dan Korespondensi serta Perlawanan terhadap Praktik “Gosip”¹³⁶

Konsep bahasa Wittgenstein relevan dalam pembentukan teori kebenaran koherensi dan korespondensi dan perlawanan terhadap gosip sebagai satu praktik yang kerap terjadi dalam masyarakat. Kebenaran dan gosip sebagaimana arti referensial sebagai sikap tak acuh pada fakta merupakan dua hal yang sangat kontras.

Teori kebenaran koherensi menyatakan bahwa pernyataan dianggap benar kalau pernyataan tersebut memiliki referensi pada suatu postulat terdahulu yang telah diterima sebagai pangkal kebenaran.¹³⁷ Pernyataan terdahulu ini ditentukan oleh bahasa yang dirumuskan. Kesalahan dalam merumuskan bahasa akan berdampak pada kesalahan dalam kebenaran pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, postulat “semua manusia pasti akan mati” adalah pangkal kebenaran untuk menegaskan kebenaran dari pernyataan “Paul pasti akan mati”. Andaikata, rumusan bahasanya diubah menjadi “beberapa orang pasti akan mati” maka pernyataan “Paul pasti akan mati” menjadi problematis. Dengan kata lain, jika postulat kedua di atas yang dianggap benar maka pernyataan kedua berubah menjadi “Paul belum tentu mati”. Konsep Wittgenstein paralel dalam konteks ini yaitu bahwa bahasa perlu memiliki referensi pada fakta dan pernyataan yang diungkapkan saat ini mesti dianalisis secara lebih terperinci terus menerus hingga menemukan suatu fakta atomis yang tepat, pasti dan tidak terbantahkan.

Selanjutnya, teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kenyataan.¹³⁸ Pernyataan “ibu kota kabupaten Sikka adalah Maumere” adalah benar karena sesuai dengan fakta bahwa Maumere adalah ibu kota kabupaten Sikka. Korelasi antara ide dan kenyataan ini tidak lain dihubungkan oleh bahasa. Teori ini

¹³⁶ Secara etimologis, gosip berasal dari kata bahasa Inggris Kuno *godsibb* yang berarti sponsor atau wali baptis. Dibentuk dari kata *God* (Tuhan) dan *Sibb-Sibling* (kerabat). Secara lebih moderat diartikan sebagai kenalan akrab, teman, tetangga atau siapa pun yang terlibat pembicaraan akrab atau iseng. Namun, seturut pemakaiannya, kata gosip berubah arti menjadi pembicaraan remeh atau rumor tak berdasar tentang orang lain. Onlineetymologydictionary, <https://www.etymonline.com/word/gossip>, diakses pada 3 Mei 2023.

¹³⁷ Prof. Dr. Kaelan, M.S, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika, op. cit.*, hlm. 12.

¹³⁸ *Ibid.*

sejalan dengan *theory picture* Wittgenstein yang menyatakan semua pernyataan yang bermakna adalah pernyataan yang menggambarkan fakta.

Secara aksiologis, konsep bahasa Wittgenstein relevan dalam upaya melawan praktik gosip, *hoax* (berita bohong). Gosip, secara epistemologis (maupun etis) menodai kebenaran faktual. Bergosip artinya menebar intrik sebagai hasil tafsir parsial yang tidak berdasar fakta atau mengandalkan satu serpihan fakta untuk menggeneralisasi sesuatu. Seorang frater yang berboncengan dengan seorang gadis misalnya membentuk persepsi seorang religius konservatif yang kebetulan berpapasan dengannya dan lalu membuatnya menebar cerita bahwa seorang frater telah berhubungan dengan seorang wanita. Padahal yang dilihat hanyalah fakta bahwa seorang frater berboncengan dengan seorang gadis. Sepotong fakta itu menimbulkan impresi dan selanjutnya membuat seseorang menggeneralisasi sesuatu. Anjuran Wittgenstein dalam konteks ini benar yaitu bahwa terhadap sesuatu yang tidak bisa dikatakan (jika sesuatu itu tidak diketahui secara utuh) maka seseorang tidak perlu mengatakan apa-apa. Atau hal yang terus diulang Wittgenstein; mengatakan sesuatu harus berbasis fakta dan bukan penilaian atasnya. Diam sebagaimana yang dianjurkan Wittgenstein penting dalam konteks kebajikan berbahasa yaitu ketika sesuatu yang ingin diucapkan melampaui batas duniaku yang saya ketahui.

4.1.1.4 Gugatan terhadap Sofisme pada Era *Pos-Truth*¹³⁹

Sofisme merupakan musuh filsafat sepanjang sejarah. Pada zaman Yunani klasik, kaum sofis sudah muncul di kota Athena beriringan dengan menguatnya iklim demokrasi. Sofisme secara sederhana merupakan paham yang menyatakan bahwa retorika, seni bicara dan keahlian berargumentasi menduduki tempat paling

¹³⁹ Sofisme berasal dari kata *Sofos* (kebijaksanaan). Sedangkan term *Post-Truth* digunakan pertama kali oleh dramawan Serbia-Amerika Steve Tesich dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di majalah *The Nation* pada Januari 1992 dengan judul *A Government of Lies*. Dalam artikel tersebut, Tesich mengungkapkan pandangannya mengenai serangkaian skandal pemerintahan Amerika Serikat yang pada akhirnya mendorong rakyat Amerika untuk memilih "berlindung" dari kebenaran. Tesich menjelaskan bahwa kebobrokan pemerintah cepat dimaafkan dan dianggap seolah-olah sebagai persoalan yang biasa oleh masing-masing rezim yang menggantikannya. Rakyat akhirnya tidak lagi memercayai kebenaran objektif dan beranggapan bahwa masalah dan skandal hanya merupakan persoalan bangunan perspektif dan cara menanggapi. Jawahi Gustav Rizal, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/09/060600682/melihat-kembali-sejarah-kemunculan-istilah-post-truth-?page=all>, diakses pada 3 Mei 2023.

sentral dalam upaya menggapai kebijaksanaan sehingga pertikaian tentang kebenaran atau ketepatan, istilah dan kata-kata menjadi tidak berguna.¹⁴⁰

Kaum sofis menggunakan pendekatan yang sederhana yaitu pendekatan bahasa manusia.¹⁴¹ Yang terpenting adalah retorika. Bahasa di tangan kaum sofis tidak digunakan untuk merepresentasikan kenyataan objektif sebab menurut mereka, kata-kata sama sekali tidak memiliki korelasi objektif dengan fakta di luar bahasa. Karena itu, bagi mereka fungsi bahasa bukan pada menggambarkan dunia/kenyataan yang benar melainkan terutama untuk membangkitkan emosi manusia agar manusia mengambil tindakan-tindakan tertentu. Kaum sofis di satu sisi dipandang sebagai mereka yang menghidupkan demokrasi karena memfasilitasi perdebatan publik. Namun, di lain sisi, mereka membawa serta relativisme moral dan relativisme kebenaran.

Seperti di Athena, para sofis dipakai untuk memengaruhi massa dengan bayaran tertentu. Karena itu, demi tujuan politis dan digerakkan dengan intensi ekonomis, kaum sofis menggunakan kepiawaian berbicara dan berargumentasi untuk menghasut massa. Kaum sofis dengan demikian merupakan mereka yang kerap mengada-adakan apa yang tidak ada dan meniadakan apa yang sebenarnya ada dengan kemampuan retorika.¹⁴²

Sofisme modern dapat diamati dalam konteks perkembangan media sosial dewasa ini dan perkembangan demokrasi liberal. Di dalam media sosial, verifikasi kebenaran faktual menjadi terhalang. Orang-orang berlagak sebagai pembuat narasi terbaik dengan kebenaran yang dipelintir sendiri. Dengan kepiawaian berbicara dan berretorika disertai kemampuan menjalankan sistem digital, sofisme bertumbuh subur. Di sinilah, realitas baru yang digambarkan sebagai era *post-truth* (pasca kebenaran), era di mana fakta objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam mempengaruhi opini publik tetapi pada daya tarik pribadi, emosi dan kepentingan.¹⁴³

¹⁴⁰ Rohmatul Izad, "Kaum Sofis Athena dan Postmodernisme", dalam *Qureta.com*, <https://www.quareta.com/post/kaum-sofis-athena-dan-postmodernisme>, diakses pada 3 Mei 2023.

¹⁴¹ Prof. Dr. Kaelan, M.S. *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁴² Rohmatul Izad, *loc. cit.*

¹⁴³ Jawahi Gustav Rizal, *loc. cit.*

Gagasan Wittgenstein dapat ditarik sebagai upaya perlawanan terhadap tendensi sofisme modern yang giat menipukan relativisme kebenaran dewasa ini. *Theory Picture* Wittgenstein menegaskan suatu imperatif untuk mengatakan sesuatu sesuai fakta dan bukan dari impresi sepintas dan tak berdasar demi suatu tujuan propaganda.

4.1.2 Dalam *Philosophical Investigations*

4.1.2.1 Diskursus Filsafat Postmodernisme

Seperti pembabakan filsafat pada umumnya, misalnya Filsafat Modernisme sebagai reaksi terhadap Filsafat Abad Pertengahan, Filsafat Postmodernisme juga merupakan reaksi/arus balik terhadap Modernisme. Reaksi itu menasar pada modernisme dengan janji-janji emansipasi dari belenggu ketidaktahuan dan lalu menyebabkan manusia tercerabut dari otonomi dirinya karena eksekusi pendidikan yang bermuara pada totalitarianisme politik dan teknik.¹⁴⁴ Secara lebih abstraktif, Filsafat Postmodernisme berupaya membongkar dan merevisi tendensi modernisme yang mengagungkan “ketunggalan” dalam rancang bangun dunia.

Bambang Sugiharto merumuskan perbedaan antara postmodernisme dan postmodernitas.¹⁴⁵ Menurutnya, Postmodernisme menunjuk pada sebuah kritik filosofis terhadap modernisme yakni corak epistemologis, gambaran dunia (*world view*) dan ideologi-ideologi modernisme, sedangkan Postmodernitas adalah suatu situasi sosial yang ditandai dengan produk teknologi informasi, globalisasi yang membongkar sekat-sekat primordialisme dan kesempitan berjejaring, fragmentasi gaya hidup, deregulasi pasar dan sarana publik serta kembalinya dunia yang diinspirasi oleh tradisi-tradisi. Secara singkat postmodernisme mengacu pada kritik paradigma filosofis sedangkan postmodernitas mengacu pada situasi/kondisi.

Namun, hemat penulis kendati Postmodernisme mengacu pada sebuah paradigma filosofis, paradigma itu tidak dapat disangkal bertolak dari situasi yang disebut postmodernitas serentak diinspirasi oleh situasi tersebut. Karena itu hemat

¹⁴⁴ Paul Budi Kleden, “Mempertimbangkan Pluralitas” dalam Willy Gaut, *Filsafat Postmodernisme Jean Francois Lyotard, Tesis-Tesis Kunci dan Masalah Status Pengetahuan Ilmiah* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. xi.

¹⁴⁵ Bambang Sugiharto, *op. cit.*, hlm. 24.

penulis, kendati dibuat distingsi antara postmodernisme dan postmodernitas, keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Filsafat Postmodernisme hemat penulis adalah refleksi kritis atas paradigma dan ideologi modernisme yang dibaca dari situasi yang disebut posmodernitas.

Secara historis, istilah Postmodernisme dipakai pertama kali oleh Jean Francois Lyotard (1924-1998) dalam karyanya berjudul *The Postmodern Condition; A Report on Knowledge* (1979). Lyotard berjasa sangat penting karena dialah yang membawa dan menerapkan istilah itu ke dalam diskursus filosofis.¹⁴⁶

Gagasan tentang Postmodernisme sedikit merupakan pengaruh dari pemikiran Wittgenstein II yang dipostulasikan dengan prinsip *meaning is use*. Istilah yang dapat merepresentasikan pemikiran Postmodernisme yang digagas Lyotard ialah Paralogi (pluriformitas) sebagai lawan terhadap homologi (uniformitas) sebagaimana tendensi modernisme dalam beragam aspek.¹⁴⁷

Kondisi Postmodern/postmodernitas menurut Lyotard ialah ketidakpercayaan atau perlawanan terhadap *grand narrative* (metanarasi). Metanarasi dapat dipahami sebagai cerita besar atau kisah utama yang dijadikan rujukan dan tolak ukur tunggal dalam menilai narasi yang lain sehingga kisah itu mentotalisasi sejarah dan tujuan manusia secara universal.¹⁴⁸ Metanarasi itu merupakan karakteristik modernisme dengan dua gerak utama.¹⁴⁹ Pertama, metanarasi mendeterminasi dan menjadi basis tunggal konseptual dalam mencari dan menetapkan standar kebenaran. Kedua, kisah besar itu pada akhirnya dilihat sebagai satu-satunya kebenaran yang dijadikan patokan dalam cara baca tunggal atas seluruh realitas. Persis, homologi dalam modernisme ini ternyata tidak saja

¹⁴⁶ Paul Budi Kleden, *loc. cit.* Jauh sebelum itu, istilah Postmodernisme sudah dipakai di dunia kesenian seperti seni rupa, seni musik, drama, arsitektur, dan juga dalam ilmu antropologi. Penggunaan istilah yang serampangan ini, membuat Postmodernisme sulit didefinisikan secara tegas dan jernih. Lih. Bambang Sugiharto, *ibid.*

¹⁴⁷ Lyotard menulis, "Wittgenstein yang mengambil studi bahasa dari luka-luka memfokuskan perhatiannya pada efek-efek mode yang berbeda dari wacana-wacana; dia menyebutnya sebagai beragam ucapan yang diidentifikasikannya dalam suatu cara (sedikit di antaranya telah saya susun), yaitu permainan bahasa." Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: a Report on Knowledge*, Penerj. Dian Vita Ellyati (Surabaya: Selasar Surabaya Publishing, 2009), hlm. 56.

¹⁴⁸ Willy Gaut, *Filsafat Postmodernisme Jean Francois Lyotard, Tesis-Tesis Kunci dan Masalah Status Pengetahuan Ilmiah* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 53.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 55

menimbulkan kemajuan tetapi juga melahirkan penindasan dan dominasi atas kehidupan karena ada tendensi pemusatan, penyeragaman serentak ada upaya simplifikasi (penyederhanaan) seluruh realitas yang beragam ini menjadi satu dan tunggal. Dalam Filsafat Postmodernisme, Lyotard dengan tegas menuduh bahwa modernisme bersifat totaliter.

Lyotard berupaya membuat observasi terhadap konsep ragam bahasa yang digagas Wittgenstein itu sebagai basis melawan metanarasi yang diringkas dalam tiga karakteristik.¹⁵⁰ Pertama, bahwa peraturan dalam permainan tidak merupakan hasil legitimasi dari permainan itu sendiri tetapi merupakan sebuah kontrak entah secara eksplisit atau tidak dari para pemainnya. Kedua, bahwa konsekuensi logis dari tidak adanya peraturan ialah raibnya permainan. Peraturan sekecil apa pun itu mendeterminasi sebuah permainan. Ketiga, setiap ucapan mesti dipikirkan sebagai langkah awal dalam suatu permainan.

Melalui pantulan kesadaran akan ragam bahasa dalam kehidupan, maka postmodernisme yang kompleks itu dapat ditunjukkan spesifikasinya sebagai berikut.¹⁵¹ Pertama, postmodernisme membongkar antroposentrisme yang naif dan memproposalkan humanitas yang integral. Modernisme bercorak sangat antroposentrik karena mengandalkan narasi tunggal akal budi sebagai tolak ukur semua aspek kehidupan. Manusia kemudian hanya dilihat dari segi akal budi sebagai ukuran kebermaknaannya di dalam dunia. Postmodernisme memproposalkan humanitas yang integral yakni aspek lain dari manusia seperti intuisi, rasa dan emosi.

Kedua, dari sisi epistemologi adanya gagasan tentang kebenaran yang lebih inklusif dan menyebar. Dua hal yang ditolak terhadap modernisme ialah pertama, klaim akan adanya kebenaran pasti, objektif dan tunggal atas realitas. Menurut Postmodernisme, pengetahuan manusia tidak pernah sempurna. Karena itu,

¹⁵⁰ Jean Francois Lyotard, *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁵¹ Kata kunci yang dikemukakan untuk membuat distingsi antara modernisme dan postmodernisme antara lain. Modernisme (sentralisasi, konstruksi, legitimasi, konsensus, kekuatan negara) sedangkan postmodernisme (desentralisasi, dekonstruksi, delegitimasi, diskonsensus, dan kekuatan bersama. Lih. Johan Setiawan, "Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan", *Jurnal Filsafat* 28:1 (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), hlm. 30.

kebenaran selalu mesti dicari. Kedua, klaim kebenaran saintifik yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan tunggal. Postmodernisme menolak anggapan ini dan memproposalkan kebenaran yang bersifat jamak yang menyasar pada lokalitas-lokalitas. Kebenaran bisa diperoleh dari dunia “pinggiran”.

Karakteristik ketiga ialah pandangan terhadap alam semesta sebagai entitas yang tidak boleh diinstrumentalisasi dan diobjektivasi semata-mata untuk kepentingan manusia. Modernisme melalui teknologi mengeksploitasi alam semesta. Postmodernisme justru melihat alam semesta memiliki nilai instrinsik tersendiri yang tidak boleh dirampas dan dirusakkan.

Keempat, kembalinya prinsip-prinsip moral dan religiositas. Modernisme melunturkan moralitas dan religiositas karena berpegang teguh pada akal budi dan antroposentrisme. Narasi tunggal akal budi menggeser moralitas dan keadaban-keadaban lokal. Karena itu, Postmodernisme merevitalisasi lokalitas tradisi dan kembali menghidupkan religiositas sebagai penuntun dalam rancang bangun dunia.

Pemikiran Wittgenstein II sangat relevan dalam diskursus Filsafat Postmodernisme. Relevansi pemikiran itu masih aktual hingga saat ini di mana narasi-narasi yang terpinggir diangkat kembali, komponen-komponen yang dilupakan kembali mendapat perhatian dan kehidupan manusia tidak hanya dilihat dan ditakar secara radikal semata-mata dari satu sisi. Kehidupan dilihat secara komprehensif dalam satu keterjalinan dan relasi dengan yang lain (bahasa yang lain, konsep yang berbeda, sesama, lingkungan, dll).

4.1.2.2 Pendasaran Konsep Toleransi dan Perlawanan Totalitarianisme

Wittgenstein berupaya memulangkan bahasa kepada kehidupan pragmatik yang memiliki ragam bentuk. Itu artinya, makna kenyataan tidak bisa dimonopoli oleh satu bahasa dari banyak ragam bahasa sebagai barometer tunggal untuk menakar dan menafsirnya.¹⁵² Sebaliknya, bentuk kehidupan diungkapkan secara

¹⁵² Berbeda misalnya dengan penentuan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Penentuan itu hanya sebuah kesepakatan kolektif negara bangsa. Bahasa Inggris di sini hanya sebagai bahasa komunikasi internasional dan tidak serta merta membawa semua paradigma Inggris (bukan aturan gramatis) untuk dipaksakan kepada konteks tertentu. Bagaimanapun juga, pemberlakuan Bahasa Inggris memperhatikan sekaligus lokalitas bahasa bahkan ragam bentuk kehidupan di dunia.

berbeda-beda dalam bahasa yang berbeda sehingga membentuk makna yang berbeda pula.

Intoleransi dan totalitarianisme dalam kehidupan diakibatkan oleh upaya segelintir orang untuk memaksakan bahasa tunggal dalam menafsir realitas.¹⁵³ Padahal kenyataan yang direpresentasikan pada prinsipnya merupakan suatu entitas yang terbuka, lebih luas dari bahasa yang selalu merupakan keputusan proposisional. Pendek kata, kenyataan merupakan medan terbuka sedangkan bahasa merupakan sebuah putusan.¹⁵⁴

Wittgenstein, dalam konsep Permainan Bahasa menunjukkan adanya pluralitas bahasa dalam kehidupan. Hal yang sama pun berlaku dalam pendasaran toleransi yang dipahami sebagai penerimaan akan pluralitas sebagai sebuah *conditio humana*.¹⁵⁵ Sikap toleran sebagaimana ragam permainan bahasa dalam kehidupan, lahir dari pengakuan akan faktum pluralisme yakni bentuk-bentuk kehidupan yang dirumuskan secara berbeda oleh manusia dengan jenis dan cara berbahasa yang berbeda pula.

Pemikiran Wittgenstein sekaligus mengandung konsekuensi bahwa untuk membangun saling pengertian dalam kehidupan maka setiap orang pun mesti masuk dan mempelajari permainan bahasa orang lain. Mengapa? Karena bahasa selalu membawa serta konteks di mana ia dirumuskan. Bahasa tidak dapat dipahami terlepas dari konteks. Untuk mempelajari konteks, seseorang mesti masuk dan “melihat dari dalam” agar memahami bahasa serta konteks secara baik. Persis, toleransi pun merupakan sebuah cara hidup yang mengupayakan sikap belajar terus menerus untuk menerima perbedaan. Bahasa teologis orang lain tidak serta merta dituduh sebagai “pengoceh” kebenaran metafisis. Jika keyakinan akan adanya satu kenyataan metafisis yang satu dan tunggal itu maka agama-agama hanya berupaya merumuskan dalam bahasa yang berbeda. Singkat kata, konsep permainan bahasa menjadi basis akan adanya berbagai macam bentuk kehidupan yang dirumuskan dalam bahasa yang berbeda pula. Pluralitas adalah sebuah *conditio humana*.

¹⁵³ Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 189.

¹⁵⁴ Bambang Sugiharto, *op. cit.*, hlm. 84.

¹⁵⁵ *Ibid.*

Permainan bahasa juga serentak menegaskan karena adanya ragam bahasa maka bahasa pun adalah suatu entitas yang terbatas. Pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang fragmentaris akibat Allah melampaui sejarah manusia atau manusia hanya menangkap sejauh kemampuannya. Allah tetap tinggal sebagai *mysterium* yang tak terselami. Karena itu, rumusan untuk medeskripsikan pengalaman akan Allah secara doktrinal selalu dalam bentuk yang tidak pernah menyeluruh dan tuntas sepanjang masa dan tempat. Mengikuti Budi Kleden, “dogmatisme adalah satu pengingkaran terhadap kerashasiaan Allah dan konservatisme merupakan satu penyangkalan terhadap keterbatasan manusia.”¹⁵⁶

Benih yang meniupkan intoleransi disebut sebagai totalitarianisme. Pemimpin yang totaliter dalam kehidupan bernegara selalu merupakan pemimpin yang berupaya memonopoli, menyamaratakan sebuah kondisi kehidupan yang beragam. Kebijakan-kebijakan politik diambil hanya semata-mata untuk pembangunan progresif, tanpa pertimbangan yang lebih kompleks. Absolutisme itu tidak hanya dalam konteks kehidupan politis tetapi juga merasuk dalam agama, ekonomi dan ideologi. Dampaknya ialah lahirnya kekerasan karena yang terjadi di dalamnya ialah penghancuran individu yang tidak “taat”.¹⁵⁷

4.2 Kritik terhadap Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein

Bagian ini akan berisi kritik terhadap pemikiran Wittgenstein. Kritik terhadap Wittgenstein dilancarkan untuk mencari celah rumpang pemikirannya. Sebagaimana yang telah diakui Wittgenstein I, “semua filsafat adalah penyelidikan terhadap bahasa”, maka kritik tidak lain ialah aktivitas menyelidiki bahasa. Penyelidikan ini terjadi terus menerus, sebuah sikap yang oleh Wittgenstein II disebut sebagai “proses belajar tanpa henti”.

Catatan kritis ini pun merupakan sebuah ajakan untuk melihat setiap pemikiran sebagai “impuls” untuk berdiskursus sebagaimana filsafat hanya dapat hidup dan berkanjang dalam sebuah dinamika kritik argumentatif. Kritik yang diterangkan di sini, khususnya terhadap Wittgenstein I tidak lagi mengulangi apa

¹⁵⁶ Paul Budi Kleden, *Menuju Titik Balik Esai-Esai tentang Teologi dan Sastra* (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2022), hlm. 68.

¹⁵⁷ Otto Gusti Madung, *loc. cit.*

yang dikritik Wittgenstein sendiri dalam karya keduanya, *Philosophical Investigations*.

4.2.1 Paradoks dalam *Tractatus Logico-Philosophicus*

4.2.1.1 Menolak Metafisika tetapi Merumuskan Bahasa Metafisik

Wittgenstein menolak metafisika karena metafisika tidak menggeluti kenyataan dunia tetapi perihal “yang melampaui” dunia. Persoalan yang dikemukakannya ialah apakah benar kenyataan itu sungguh ada atau hanya sebuah angan-angan belaka. Penolakan itu semata-mata berbasis pada klaim kebermaknaan bahasa yang dipandang benar jika menggambarkan keberadaan peristiwa/dunia. Bahasa yang tidak menggambarkan dunia adalah bahasa yang tidak bermakna. Metafisika karena itu dipandang tidak bermakna karena menggunakan bahasa yang *non sense*. Hal yang sama pun berlaku bagi etika, estetika dan teologi.

Namun, jika diperiksa secara jeli, Wittgenstein pada akhirnya menimbulkan paradoks dan jatuh dalam inkonsistensi pemikirannya sendiri. Pada dalil 1.1, Wittgenstein menulis, “dunia adalah kumpulan fakta, bukan kumpulan benda-benda”. Pernyataan ini pun hemat penulis adalah sebuah pernyataan metafisik. Menyebut dunia adalah kumpulan fakta (peristiwa) berarti membuat suatu putusan yang melampaui sebuah kenyataan empirik. Atau pada dalil 4.0031, Wittgenstein menulis, “semua filsafat adalah kritik bahasa”. Pernyataan ini pun tidak lain adalah sebuah rumusan metafisik.

Semua dalil yang dikemukakan Wittgenstein dalam *Tractatus* bahkan merupakan pernyataan metafisik, sesuatu yang sebenarnya ia tolak secara radikal sebagai yang tidak bermakna. Karena itu, Filsafat yang adalah penyelidikan terhadap bahasa pun adalah sebuah aktivitas metafisik (melampaui pengalaman-pengalaman aksidental) untuk memeriksa setiap bahasa.

Wittgenstein pada akhirnya tidak bisa terlepas dari metafisika secara tegas karena metafisika justru menjadi fondasi utama dalam berfilsafat. Penolakan dan ketidakpercayaan terhadap metafisika justru merupakan sebuah penolakan juga terhadap filsafat.

4.2.1.2 Ambivalensi antara Filsafat sebagai Aktivitas dan Imperatif “Diam”

Ada empat hal yang telah disebutkan terdahulu, yang menurut Wittgenstein tidak dapat dibahasakan secara bermakna; subjek, kematian, Allah dan bahasa itu sendiri. Berhadapan dengan empat komponen ini, bagi Wittgenstein, setiap orang jangan mengucapkan sepatah kata pun/diam. Alasannya karena keempat komponen itu bukan termasuk dunia yang dapat digambarkan melalui bahasa yang bermakna.

Namun, di bagian lain pemikirannya, Wittgenstein justru menerangkan bahwa filsafat adalah sebuah aktivitas; penyelidikan/kritik terhadap bahasa. Prinsip filsafat seperti ini mengharuskan setiap orang untuk berbicara, berpikir dan bahkan saling membantah secara argumentatif. Sikap diam menunjukkan bahwa seseorang tidak menghidupkan filsafat. Kebenaran, kebaikan dan keindahan yang dicari dalam berfilsafat menuntut setiap orang untuk aktif berpikir dan mengungkapkan pikirannya melalui dan dalam bahasa.

Berfilsafat mengharuskan orang berbahasa. Penolakan Wittgenstein terhadap pembicaraan tentang Allah menunjukkan sekaligus bahwa Teologi adalah salah satu bidang ilmu yang tidak bermakna. Kendati penolakan ini dikritiknya sendiri dalam *Philosophical Investigations* yakni bahwa Teologi juga merupakan salah satu permainan bahasa dari beragam permainan bahasa dalam kehidupan, penolakan ini pun serentak menafikan bahwa tentang sesuatu yang tidak empiristis kerap ditemukan kebenarannya secara faktual. Pengalaman-pengalaman spiritual-mistis misalnya dianggap tidak dapat diverifikasi (ditemukan sebab-sebab logis-faktis) tetapi terjadi dan dialami. Karena itu, pengagungan yang berlebihan terhadap proposisi yang empiristis justru problematis secara praksis.

Di sini, satu hal yang pasti ialah pembicaraan terhadap sesuatu yang tidak empiris itu dapat dibahasakan melalui paham atau metode analogi.¹⁵⁸ Paham atau

¹⁵⁸ Secara spesifik dapat ditemukan dalam pengalaman mistik (*mystical experience*) dan pengalaman religius (*religious experience*) yang sebenarnya mengandung banyak kelemahan dalam soal identifikasi dan verifikasi karena pengungkapannya mengandung bahasa-bahasa metafisis. Jika seorang beriman kepada Tuhan berbicara mengenai Allah maka ucapannya tentang Allah tidak bisa berlaku secara univok (serba sama) ataupun ekuivok (serba berbeda). Allah yang dibahasakan tidak sama dengan sesuatu pun yang ada di dunia serentak tidak berbeda secara tegas dan radikal dengan yang ada di dunia. Sikap moderat yang diambil dari tegangan ini ialah “jalan ketiga” yakni paham analogi. Dr. Muhammad Sabri, M.A, *Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik dari Filsafat Analitik ke Epistemologi Hudhuri* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 95.

metode analogi dapat dijelaskan dan ditempuh sedikitnya melalui tiga jalan yakni jalan positif (*via positiva*), jalan negatif (*via negativa*) dan terakhir jalan eminensi (*via eminentiae*). Pengalaman mistik dan religius tentang Tuhan misalnya membuat seseorang mengatakan dan mengakui bahwa Allah adalah pengasih. Dalam jalan positif (*via positiva*), ia mengakui bahwa sifat pengasih dalam diri manusia juga sebenarnya ada dalam diri Allah. Selanjutnya melalui jalan negatif (*via negativa*), ia juga mengakui bahwa Allah yang adalah pengasih itu sebenarnya tidak sederhana sifat pengasih dalam level manusiawi. Terakhir melalui bahasa eminensi, Allah itu digambarkan sebagai jalan tengah dari dua paradoks dalam membahasakan Allah di atas. Bahasa eminensi memiliki kebenaran tersendiri dalam membahasakan realitas yaitu melalui metafora dan simbol kreatif.¹⁵⁹ Allah yang baik dan pengasih bisa digambarkan sebagai yang “maha” pengasih. Atau kasih Allah itu misalnya dideskripsikan sebagai “semesta yang tak terjangkau dan palung samudera yang tak terselami”. Metode analogi di atas secara tegas dapat diaplikasikan dengan jalan yang disebut terakhir ini. Thomas Aquinas adalah contoh salah seorang Teolog Katolik yang menggunakan jalan eminensi untuk membahasakan Allah

Lebih lanjut, cara lain untuk membela kebermaknaan bahasa non-positivistik ialah dengan jalan negasi. Pembicaraan tentang Tuhan dalam Teologi misalnya bukan menggunakan bahasa yang dimaksudkan sama persis menggambarkan tentang Tuhan yang sebenarnya melainkan dengan menggambarkan sesuatu yang bukan Tuhan yakni menunjukkan bahwa pembahasan tentang realitas yang aksidental dan terbatas menimbulkan konsekuensi-konsekuensi logis akan entitas yang tidak terbatas, yang disebut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan tidak dibahasakan dengan bahasa yang eksak menunjukkan Tuhan tetapi dengan menunjuk sesuatu yang bukan Tuhan.

Secara epistemologis, berfilsafat pada prinsipnya adalah berbahasa dalam dinamika pemikiran argumentatif. Jika sikap diam dipakai sebagai semacam kebajikan di hadapan sesuatu yang tidak empiristis karena dianggap yang non empiris tidak relevan maka filsafat justru akan mandek dan dengan demikian

¹⁵⁹ *Ibid.*

filsafat tidak lagi berkanjang. Alasannya sederhana yakni karena yang tidak empiristis dalam kehidupan dapat pula ditilik dan dibahasakan dengan cara yang berbeda dalam keragaman bahasa kehidupan.

Jika dibuat antitesis terhadap imperatif diam maka apa yang digagas Karl Jaspers tentang kemungkinan bertanya di hadapan situasi batas menjadi gagasan yang sedikit mendukung penolakan terhadap imperatif diam.¹⁶⁰ Jaspers berpandangan bahwa di hadapan pengalaman-pengalaman batas yang kendati tidak mendapati penjelasan yang memadai, manusia akan selalu mengajukan pertanyaan filosofis.¹⁶¹ Misalnya, di hadapan suatu bencana alam yang mengerikan ataupun pengalaman kehilangan orang-orang tercintanya, manusia terhentak dalam kesedihan mendalam sambil bertanya, “mengapa semua ini terjadi?”. Pertanyaan “mengapa” merupakan satu spontanitas yang tidak bisa disangkal. Di hadapan satu pengalaman yang sulit dijelaskan terbukti bahwa manusia selalu bertanya, sebuah respons intuitif yang semacam telah “terfilogenetik” dalam dirinya. Dengan demikian, imperatif diam sebagaimana yang digagas Wittgenstein tentu sangat problematis karena secara faktual, pertanyaan filosofis (filsafat) memang selalu diajukan.

Sebagai pengandaian tandingan, jika terhadap sesuatu yang tidak menggambarkan dunia (subjek, Allah, kematian dan bahasa) orang harus diam maka respons terhadap subjek akan hilang. Akibat kematian misalnya tidak bisa menjadi sesuatu yang dikisahkan untuk kemudian dipelajari sebagai sejarah yang memberi peringatan dan referensi. Demikian pun, pembelajaran bahasa tidak dipelajari sebagai satu kurikulum penting yang menentukan perkembangan kehidupan akademis manusia.

Karena itu, dengan mengajukan pertanyaan filosofis di hadapan suatu situasi batas, refleksi dimungkinkan, kisah dan narasi bisa diciptakan. Misalnya, pengalaman penderitaan bisa didiskusikan sebagai salah satu akibat dari perbuatan dosa atau kejahatan manusia terhadap Allah atau karena sikap destruktif manusia

¹⁶⁰ Armin E Wildermuth, "Karl Jaspers and the concept of philosophical faith", *Existenz, An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts*, 2:2 (2007), hlm. 8-18.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 9.

terhadap lingkungan hidupnya. Pembicaraan itu kemudian dibahasakan dalam bentuk narasi tertulis dan kemudian berguna bagi sejarah perkembangan manusia.

Hemat penulis, imperatif diam yang digagas Wittgenstein tidak tepat dalam konteks dialektika kehidupan dan pergulatan filsafat dewasa ini. Pengalaman spiritual, emosional yang tidak mendapat pendasaran empiris sekalipun dapat dibahasakan untuk selanjutnya menjadi titik pijak refleksi dalam sejarah kehidupan manusia.

4.2.2 Kritik terhadap *Philosophical Investigations*

4.2.2.1 Permainan Bahasa Merobohkan Universalitas Epistemologi Kebenaran

Konsep permainan bahasa digagas untuk menjawab kenyataan dunia yang beragam serentak upaya membantah *picture theory* yang berbasis pada kesesuaian antara proposisi dan fakta (*meaning is picture*) sebagaimana yang digagas dalam *Tractatus*. Namun, permainan bahasa serentak menimbulkan kendala.

Kendala utama yang dihadapi ialah akibat ganda konsep pluriformitas bahasa yang kemudian mendasarkan konsep pluralisme secara umum. Di satu sisi, pluralisme relevan dalam konteks respek kultural dan pendasaran toleransi dalam berbagai tarafnya tetapi di sisi lain, pluralisme yang diakibatkan serentak menimbulkan problematik serius dalam epistemologi yakni masalah rasionalitas.¹⁶²

Rasionalitas pada prinsipnya bersentuhan dengan perkara bahasa.¹⁶³ Persoalannya ialah bahasa yang pada dasarnya mencerminkan beragamnya bentuk kehidupan serentak didasarkan oleh konstruksi beragamnya bentuk kehidupan dimaksud. Imbasnya, tindakan dan pembicaraan yang digolongkan sebagai yang rasional kemudian berbeda antara satu bahasa dan bahasa yang lain karena ukuran, aturan dan produk dari bahasa tersebut menciptakan pemahaman yang berbeda pula.¹⁶⁴ Rasionalitas kemudian tidak lagi bersifat universal dan mutlak tetapi bersifat sementara, hipotetik, dan konvensional semata.

¹⁶² Bambang Sugiharto, *op. cit.*, hlm. 58.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

Hemat penulis, yang absen dari pemikiran Wittgenstein ialah penjelasan dan uraian tentang dengan cara apa menjembatani permainan bahasa dalam kehidupan. Konsep “Kemiripan Keluarga” (*family resemblance*) yang digagas Wittgenstein tidak tepat dalam menjawab pertanyaan bagaimana menjembatani beragamnya permainan bahasa. Kemiripan keluarga hanya menjelaskan bahwa di setiap bentuk permainan bahasa ada kemiripan yakni dengan menyebut kata yang sama untuk maksud yang nyaris sama dalam konteks yang berbeda. Sebagai misal, proposisi “Indonesia sarang koruptor”. Kata “sarang” dalam konteks kalimat itu berbeda dengan sarang dalam arti sebenarnya yaitu sebagai ”tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang unggas seperti burung untuk bertelur dan memelihara anaknya”.¹⁶⁵ Kata sarang dengan demikian dimaksudkan secara sama tetapi dalam konteks yang berbeda. Di sini, kemiripan keluarga yang digagas Wittgenstein tidak secara eksplisit menjawab apa sebenarnya yang menghubungkan kemiripan itu, apakah metafora, analogi atau kontradiksi atau sifat arbitrer (mana suka) bahasa di tangan penggunanya? Hemat penulis, posisi itulah yang absen dalam pemikiran Wittgenstein.

4.2.2.2 Pluralitas Bahasa dan Masalah Kepribadian yang “Terpecah”

Permainan bahasa adalah sebuah proses belajar terus menerus. Wittgenstein mengemukakan bahwa Permainan Bahasa dipelajari sejak kecil dan proses belajar itu tidak akan berakhir. Karena konteks hidup yang beragam dan postulat bahwa dunia tidak pernah statis maka penggunaan bahasa pun selalu akan berubah sesuai konteks yang beragam tersebut.

Gagasan Wittgenstein ini tepat dalam konteks metodologi epistemis yakni upaya mempelajari bahasa secara terus menerus dan terlebih dahulu memperhatikan aspek pragmatika untuk memahami sebuah bahasa secara lebih komprehensif. Namun, konsekuensi lanjutannya ialah bahasa menjadi sedemikian relativistik karena pragmatika bahasa justru menemukan keberagaman yang sulit ditemukan titik temunya.

¹⁶⁵ Bdk. KBBI V.

Persoalannya ialah bahasa tidak hanya menjadi media penyalur informasi, yang merepresentasikan sebuah kenyataan tetapi juga bahasa telah membentuk dunia kenyataannya sendiri. Ketika bahasa dipakai, bahasa adalah kenyataan baru karena orang melihat bahasa terlebih dahulu untuk kemudian mengecek kebenaran di baliknya. Kenyataan bahasa membuka dua peluang sekaligus; membantu orang memahami sesuatu secara lebih jelas dan serentak menimbulkan makna baru yang sama sekali tidak dimaksudkan oleh seorang perumus bahasa. Bahasa dengan demikian menjadi identitas diri. Bahasa adalah makna di mana orang mengidentifikasi diri dan selanjutnya membentuk dunianya.

Kritik terhadap gagasan Permainan Bahasa ialah akibat Permainan Bahasa yang terlampau bablas sehingga menimbulkan keterpecahan diri subjek (*split subject*) atau apa yang oleh Jacques Lacan disebut sebagai Kepribadian Skizofrenik (kepribadian yang terpecah).¹⁶⁶ Bahasa membentuk identitas bahkan menentukan identitas. Persoalannya ialah jika proses pembentukan bahasa kembali ke dalam pragmatika kehidupan yang tanpa kendali dan terlampau luas ini maka identifikasi itu hampir pasti selalu gagal dan subjek terombang ambing dalam suatu dunia yang ambigu, yang juga membuatnya kesulitan memantapkan satu konsep yang utuh, jelas dan koheren.

Kritik yang dimaksudkan penulis di sini masuk dalam persoalan pembentukan subjek melalui bahasa, sebuah kajian yang lebih terfokus pada aspek psikolinguistik seturut konsep Lacan. Lacan berpendapat bahwa subjek terpecah diakibatkan oleh tatanan simbolik yang tidak stabil, yakni bahwa subjek hanyalah apa yang diterjemahkan. Lacan melihat secara positif bahwa proses ini terjadi secara alamiah. Misalnya, kata “aku” dalam kalimat “Aku adalah anak dari si A” hanyalah representasi dari subjek yang adalah anak si A.¹⁶⁷ ada keterpecahan antara “aku” dan kenyataan fisik yang dirujuk oleh kata “aku”.

Namun, dalam konteks pemikiran Wittgenstein, jika Wittgenstein tetap mempertahankan bahwa Permainan Bahasa selalu dilihat pertama-tama dalam

¹⁶⁶ Lisa Lukman, *Proses Pembentukan Subjek Antropologi Filosofis Jacques Lacan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 84.

¹⁶⁷ *Ibid.*

aspek pragmatika berbahasa maka keterpecahan itu hemat penulis justru diekstremkan, diperuncing. Hal ini karena bahasa untuk menunjuk subjek dapat pula digunakan secara sangat beragam lebih-lebih dalam konteks penggunaan bahasa-bahasa kekinian. Keyakinan terhadap permainan bahasa yang terlampau kuat sebagai satu pengakuan akan pluralitas makna dapat membuat bahasa kehilangan kendali di tangan penggunanya.

Konsekuensi keragaman bahasa ini dapat dilihat dalam konteks sekarang yakni dalam era disrupsi teknologi. Permainan bahasa begitu mencuat dalam media. Bahasa digunakan dengan sewenang-wenang oleh setiap orang. Berbahasa sendiri menimbulkan konflik tak terkendali dan bahkan permusuhan antar individu, kelompok atau golongan. Keragaman bahasa serentak membuka peluang klaim parsial yang tak berkesudahan. Pluralitas kemudian menjadi sedikit problematis dalam dirinya.

Kepribadian skizofrenik dilihat dalam konteks konsekuensi beragamnya permainan bahasa dalam kehidupan. Hal yang hemat penulis absen dalam pemikiran Wittgenstein tentang bagaimana menempatkan satu karakteristik epistemologis bahasa dalam merancang sebuah keberagaman bahasa dan bentuk kehidupan.